

# ANALISIS SISTEMATIKA DAN KONTEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI

## SYSTEMS AND CONTENT ANALYSIS LOCAL GOVERNMENT WORK PLAN (RKPD) CHANGE SUKABUMI CITY DEVELOPMENT PLANNING AGENCY

<sup>1</sup>Rizkiyana Aulia Romadona, <sup>2</sup>Muhamad Nur Afandi

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung  
e-mail: [rizkiyanaauliar@gmail.com](mailto:rizkiyanaauliar@gmail.com), [m.nurafandi@poltek.stialanbandung.ac.id](mailto:m.nurafandi@poltek.stialanbandung.ac.id)

### ABSTRAK

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan RKPD Perubahan Kota Sukabumi dilakukan karena terjadi pandemi covid-19, yang menjadikan dilakukan *refocusing* anggaran dan penyesuaian pendapatan serta anggaran belanja yang berpengaruh terhadap capaian sasaran pembangunan tahun 2021. Perubahan RKPD tahun 2021 merupakan upaya untuk menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang ada, dengan mempertimbangkan seluruh jenis pendapatan yang diterima baik berupa pendapatan asli daerah maupun berupa pendapatan daerah. Proses pensinergian ini berupa sebuah RKPD Perubahan yang nantinya akan menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rencana Kerja sebagai dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan (KUPA-PPAS).

Kata kunci—  
RKPD, *Refocusing*,  
Pandemi covid-19.

### ABSTRACT

*The Local Government Work Plan Document is a planning document that is integrated with other planning documents, which are prepared in a time-framed manner including the Long-Term Development Plan (RPJP), the Medium-Term Development Plan (RPJM) and the Regional Government Work Plan (RKPD). The process of preparing the RKPD for the Change of Sukabumi City was carried out due to the covid-19 pandemic, which resulted in budget refocusing and adjustment of income and expenditure budgets that affected the achievement of development targets in 2021. The change in the RKPD in 2021 was an effort to adjust spending with existing income, taking into account all types of income received, both in the form of local revenue and in the form of regional income. This synergistic process is in the form of an RKPD Amendment which will later become a reference for regional apparatus to refine the Work Plan as the basis for the preparation of General Policies for Amendments to the Regional Budget and Priority Ceiling for the Temporary Budget Ceiling of the Revised APBD (KUPA-PPASP).*

Keywords—  
RKPD, *Refocusing*,  
covid-19 pandemic.

## 1. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah unsur penting yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan nasional. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang muncul karena tidak terjadi transparansi. Adanya proses perencanaan pembangunan ini yaitu agar rencana pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan tersistematis.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi yakni bertanggung jawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Otonomi memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dimana sebelumnya pembangunan yang dirasakan masyarakat masih bersifat sentralistik. Karenanya, keberhasilan pelaksanaan otonomi tidak terlepas dari kemampuan keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah (Afandi, 2016).

Dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2021 memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan peran masyarakat dalam pelaksanaannya demi kesejahteraan rakyat.

Proses penyusunan RKPD Perubahan tahun 2021 Kota Sukabumi dilakukan karena terjadi pandemi covid-19, yang sejatinya dilakukan karena estimasi pendapatan tidak tercapai dan sebagai upaya untuk pemenuhan belanja wajib, menjadikan dilakukan *refocusing* anggaran dan penyesuaian pendapatan serta anggaran belanja yang berpengaruh terhadap capaian sasaran pembangunan tahun 2021. Perubahan RKPD tahun 2021 merupakan upaya untuk menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang ada, dengan mempertimbangkan seluruh jenis pendapatan yang diterima baik berupa pendapatan asli daerah maupun berupa pendapatan daerah. Proses pensinergian ini berupa sebuah RKPD Perubahan yang nantinya akan menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rencana Kerja sebagai dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan (KUPA-PPAS).

Perubahan RKPD fokus bertujuan untuk proses pemenuhan belanja wajib dan mengikat, prioritas pembangunan, program unggulan serta yang paling utama yaitu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 terutama dalam hal mendukung pelaksanaan vaksinasi, pemenuhan insentif tenaga kesehatan, penyediaan jaringan pengaman sosial dan pemulihan keadaan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19. Kendala yang terjadi dalam proses perubahan RKPD diantaranya :

- a. Permasalahan pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Hal ini menjadikan munculnya perubahan anggaran atau *budgeting*.
- b. Selain pandemi, salah satu penyebab RKPD murni dirubah menjadi RKPD Perubahan adalah sebagai upaya untuk menyesuaikan dan menelaraskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah di Kota Sukabumi dengan RKPD Perubahan.
- c. Penyebab selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di dalam agenda RKPD.

## 2. METODE PELAKSANAAN

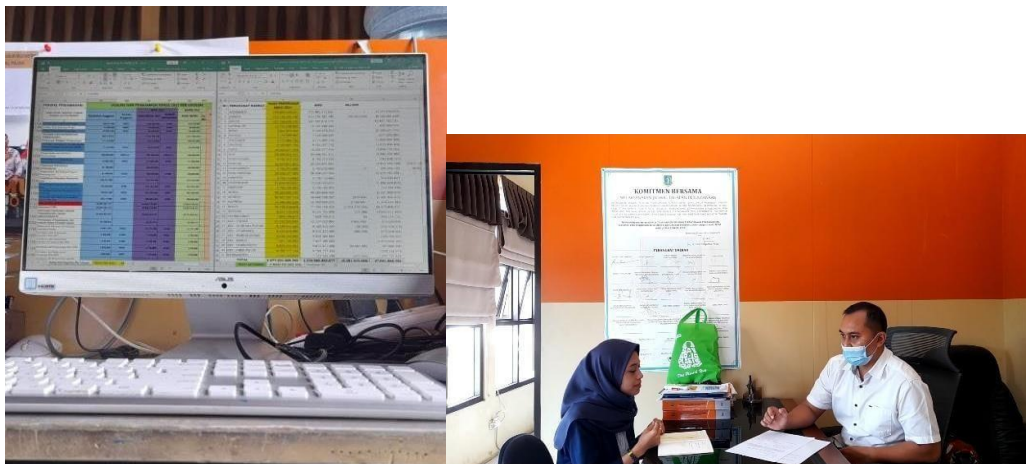
### 2.1 Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan observasi, studi dokumen dan wawancara. Kegiatan observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif, dikarenakan penulis turut serta dalam kegiatan revisi dan input perubahan angka anggaran-anggaran dalam Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan (KUPA-PPAS).

### 2.2 Sumber Data

Dalam proses penelitian, sumber data yang diperoleh oleh peneliti yakni bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer penulis dapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan pada proses magang selama 40 hari kerja, di BAPPEDA Kota Sukabumi. Proses mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara dari bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, yakni kepala subbidang Perencanaan dan Pendanaan, Bapak Asep Supriadi, AM.KG.,SKM. M.Tr.AP.

Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari proses analisis dokumen, seperti dokumen RKPD, RPJMD serta dokumen atau peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penyusunan RKPD Perubahan tahun 2021 di Kota Sukabumi.



Gambar 1.1 kegiatan input perubahan anggaran SKPD di Kota Sukabumi & Wawancara

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses perubahan RKPD terjadi beberapa kendala yang menjadi penghambat proses perubahan. Banyak faktor yang berperan di dalamnya yang menjadi kendala keberlangsungan input dan refocusing anggaran yang ada.

Kendala yang terjadi dalam proses perubahan RKPD diantaranya :

- a. Permasalahan pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Hal ini menjadikan munculnya perubahan anggaran atau *budgeting*.

Fokus dalam perubahan RKPD Tahun 2021 ini adalah untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, prioritas pembangunan, program unggulan serta yang paling utama adalah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 terutama dalam hal mendukung pelaksanaan vaksinasi, pemenuhan insentif tenaga kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi yang metode pemenuhannya dianggarkan melalui skema Bantuan Tidak Terduga (BTT). Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melalui 3 faktor, yakni Kesehatan; Sosial; serta Pendidikan.

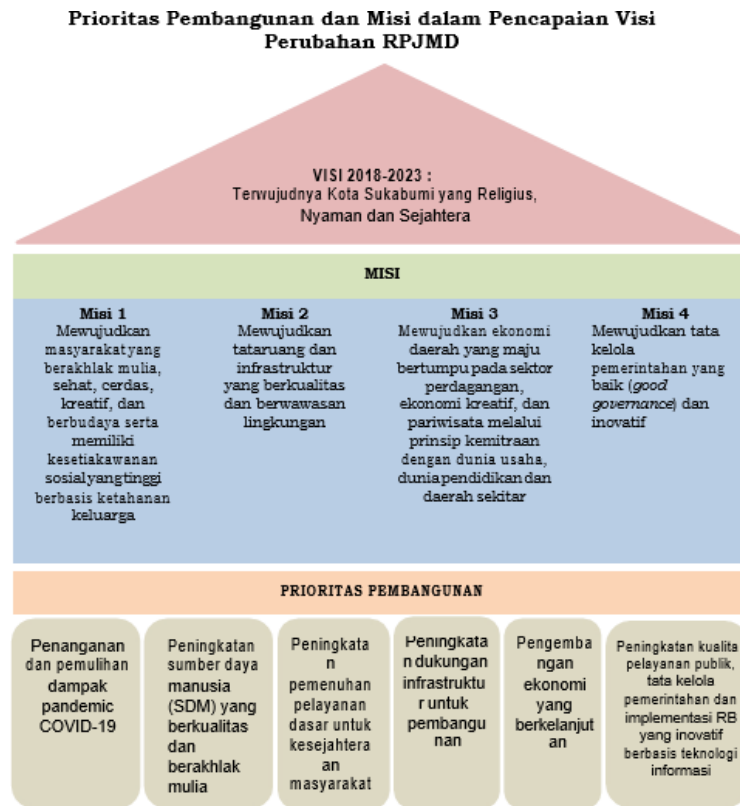
- b. Selain pandemi, salah satu penyebab RKPD murni dirubah menjadi RKPD Perubahan adalah sebagai upaya untuk menyesuaikan dan menyelaraskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah di Kota Sukabumi dengan RKPD Perubahan.
- c. Upaya untuk menyesuaikan dan menyelaraskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah di Kota Sukabumi dengan RKPD Perubahan. Bentuk penyesuaian dan penyelarasan ini dalam bentuk Pagu anggaran antara Perangkat Daerah yang ada di Kota Sukabumi dengan dokumen RKPD Perubahan, sehingga nantinya akan saling bersinergi satu sama dengan yang lainnya.

Tabel 6.1  
Pagu Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	APBD MURNI 2021	PERUBAHAN PARSIAL	PERUBAHAN RKP	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	263,155,396,482	277,849,028,083	279,133,369,771	(4,022,026,711)	(1.42)
2	Dinas Kesehatan	448,854,047,501	472,425,998,280	408,802,933,218	(40,051,114,283)	(8.92)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	67,328,675,389	102,708,912,618	103,432,289,092	36,103,613,703	53.62
4	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	12,078,328,938	13,062,818,012	12,895,151,062	816,822,124	6.76
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,839,007,054	3,866,456,100	3,274,322,563	(2,564,684,391)	(43.92)
6	Dinas Sosial	7,502,728,781	7,515,688,644	6,798,128,926	(704,599,855)	(9.39)
7	Dinas Tenaga Kerja	5,737,565,011	4,348,348,132	3,771,059,724	(814,175,487)	(17.78)
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	11,673,506,148	10,951,503,337	9,561,536,946	(2,081,969,202)	(17.88)
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	18,891,406,678	14,862,492,552	15,238,065,024	(3,653,341,654)	(19.34)
10	Dinas Lingkungan Hidup	35,965,757,303	29,753,353,427	29,097,103,229	(6,868,654,074)	(19.10)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,967,839,047	6,914,907,712	6,748,595,310	(219,243,737)	(3.15)
12	Dinas Perhubungan	25,144,787,440	20,661,331,729	20,078,026,420	(5,066,761,020)	(20.15)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,305,288,934	5,868,652,792	5,642,586,560	337,297,726	6.36

Bentuk penyesuaian terlihat dari bertambah atau berkurangnya Pagu Anggaran dari APBD Murni 2021 hingga Perubahan RKPD. Berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada masing-masing perangkat daerah diatas, selanjutnya akan dirinci berdasarkan keterkaitan atau program yang mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta program unggulan kepala daerah yang telah dijanjikan dan tertuang pada dokumen perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023.

- d. Penyebab selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di dalam agenda RKPD. Penentuan skala prioritas untuk menentukan prioritas dari program yang ada di dalam agenda RKPD. Bencana pandemi covid-19, berdampak sangat luas terhadap berbagai aspek perekonomian dan kesehatan sehingga berimplikasi negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif ini terlihat dari turunya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi, yang berdampak bagi dunia usaha yaitu menurunnya aktivitas perdagangan sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri ini mengakibatkan munculnya gelombang PHK yang cukup besar dan terhambatnya proyek-proyek infrastruktur yang mengakibatkan perlambatan angka investasi. Dalam sektor kesehatan pandemi covid-19 berperan dalam meningkatkan angka kesakitan dan kematian yang pada ujungnya akan mengakibatkan meningkatnya kondisi kerentanan sosial masyarakat.



Mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka prioritas pembangunan yang ada dalam RKPD Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi;
3. Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan;
5. Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan;
6. Penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19

#### 4. KESIMPULAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 di Kota Sukabumi, terjadi karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam agenda RKPD Murni, sehingga dibuatlah perubahan RKPD yang dimaksudkan untuk menyesuaikan anggaran yang ada dengan Renja dan Renstra Perangkat Daerah di Kota Sukabumi. Beberapa kendala yang menjadi pokok permasalahan dari disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yaitu karena perubahan anggaran yang terjadi karena kondisi pandemi yang masih berlangsung, menjadikan beberapa target yang ada di dalam RKPD murni tidak terlaksana karena bukan merupakan program unggulan atau prioritas, sehingga akan dihilangkan atau dimasukkan ke dalam RKPD tahun selanjutnya. Selanjutnya mengenai penyesuaian Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah di Kota Sukabumi dengan RKPD Perubahan. Hal ini untuk menyelaraskan Pagu anggaran Perangkat Daerah yang ada di Kota Sukabumi dengan dokumen RKPD Perubahan. Pokok permasalahan selanjutnya Menetapkan

prioritas program dengan menyesuaikan dengan keadaan yang ada, dimana pandemi covid-19 masih berlangsung. Dalam mengatasi kendala diatas maka BAPPEDA Kota Sukabumi melakukan penyelesaian diantaranya sebagai berikut :

- a. Perubahan RKPD merupakan sebuah upaya yang paling utama dalam proses perubahan RKPD ini adalah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 terutama dalam hal mendukung pelaksanaan vaksinasi, pemenuhan insentif tenaga kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi yang metode pemenuhannya dianggarkan melalui skema Bantuan Tidak Terduga (BTT). Ada 3 sektor utama yang menjadi fokus penanggulangan yang dilakukan pemerintah. Diantaranya seperti kesehatan, Sosial dan Ekonomi.
- b. Dalam upaya menyesuaikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah di Kota Sukabumi dengan RKPD Perubahan. bentuk penyesuaian ini berupa perubahan-perubahan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada masing- masing perangkat daerah, dan selanjutnya akan dirinci berdasarkan keterkaitan atau program yang mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta program unggulan kepala daerah yang telah dijanjikan dan tertuang pada dokumen perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023.
- c. Penentuan skala prioritas untuk menentukan prioritas dari program yang ada di dalam agenda RKPD. Prioritas unggulan ini Mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka prioritas pembangunan yang ada dalam RKPD Perubahan adalah sebagai berikut :
  - 1) Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;
  - 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi;
  - 3) Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
  - 4) Peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan;
  - 5) Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan;
  - 6) Penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19

## 5. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang penulis dapat berikan adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya perubahan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh subbidang perencanaan dan pendanaan, hal ini nantinya akan membantu SKPD untuk memudahkan proses perubahan. Perlunya melakukan penyaringan mengenai skala pentingnya sebuah program atau kegiatan yang ada di RKPD Perubahan, dengan begitu maka akan menghasilkan program unggulan prioritas.
- b. Membuat video tutorial, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara SKPD yang ada di Kota Sukabumi. Video tutorial ini akan dilengkapi dengan tatacara berbentuk visualisasi dan audio, yang di dalamnya membahas dengan jelas dan rinci mengenai tata cara perubahan anggaran dalam RKPD Perubahan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BAPPEDA Kota Sukabumi yang telah memberi tempat dan izin dalam proses penelitian serta uji coba pengumpulan data di Kota Sukabumi, sehingga penulis dapat mengumpulkan data yang menjadi bahan untuk menulis tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M.N., & Sianipar, R. (2018). ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kota Sukabumi.  
<https://jdih.sukabumikota.go.id/home/dokumen/peraturan-daerah>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Sukabumi Tahun 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Sukabumi tahun 2018-2023

Warda, Nur Ainul. (2021). *Analisis Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah di Kabupaten Soppeng*. [online].  
[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13166-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13166-Full_Text.pdf).